

BAB II

HOAX DAN POTENSINYA TERHADAP KERESAHAN MASYARAKAT

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang mengikuti arus perkembangan zaman. Hal ini ditandai dengan adanya media baru. Media baru merupakan sebuah jenis media yang dihasilkan dari proses digitalisasi perkembangan teknologi. Istilah ini muncul sejak adanya internet. Media yang sangat bergantung dengan internet disebut juga dengan media online, seperti situs web (website), media sosial, situs e-commerce dan aplikasi chatting yang memudahkan kehidupan manusia. Kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh media online berpengaruh terhadap cara kerja jurnalistik dan juga akses informasi masyarakat. Proses pembuatan dan penyebaran informasi tidak lagi hanya melalui portal berita resmi, namun siapapun yang memiliki akses ke media tersebut dapat membuat dan menyebarkan informasi. Masyarakat dapat mengakses informasi dimanapun dan kapanpun hanya dengan menggunakan internet. Di tengah dampak positif yang diberikan, keberadaan media online juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Informasi – informasi palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan mudah tersebar dan diakses oleh masyarakat. Informasi ini disebut dengan *hoax*.

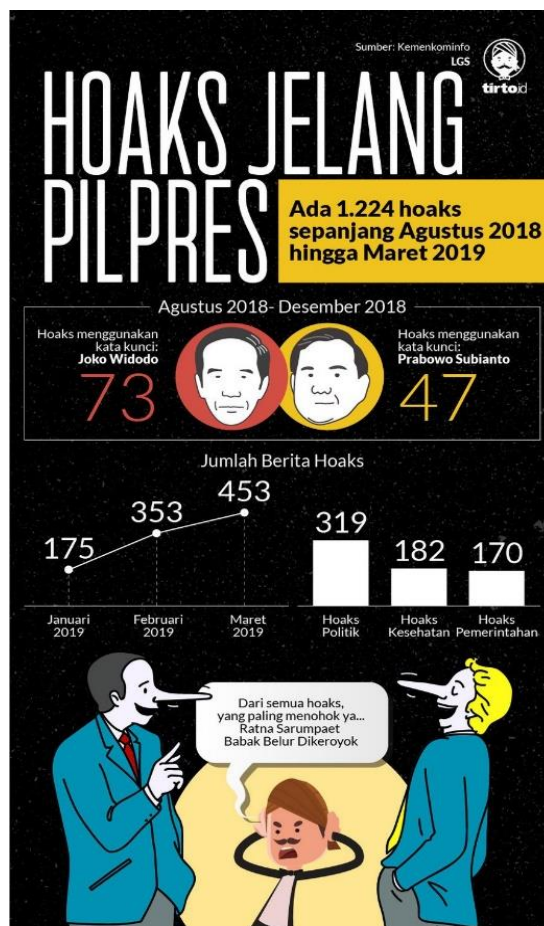
Hoax dapat didefinisikan sebagai informasi palsu dan seringkali sensasional yang disebar dengan kedok berita. Yang membedakan *hoax* dari berita hanyalah kepalsuannya dengan niat untuk menipu. Terdapat berbagai macam jenis *hoax*, diantaranya adalah misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Berdasarkan

survey yang dilakukan oleh MASTEL pada tahun 2019, masyarakat menerima *hoax* dalam bentuk tulisan, foto, maupun video setiap harinya. Informasi *hoax* ini mayoritas disebarluaskan melalui saluran media online, seperti sosial media, aplikasi chatting dan website (<https://mastel.id>, diakses pada 10 September 2020). Adanya fitur *echo chambers* dan *filter bubbles* di media sosial semakin meningkatkan perkembangan *hoax*. Fitur – fitur ini memungkinkan seseorang untuk terhubung dengan orang lain yang mempercayai berita *hoax* dan memungkinkan untuk terpapar pada berita tersebut. Peningkatan keterpaparan ini meningkatkan kepercayaan terhadap berita yang didapatkan, dan lebih kecil kemungkinannya untuk terpapar informasi yang akan melawan *hoax* (Greifenender dkk, 2020 : 30). Hal ini berdampak pada peningkatan penyebaran *hoax*.

Selain fitur *echo chambers dan filter bubble* yang ada dalam media sosial, literasi media yang rendah juga berdampak dalam meningkatkan penyebaran *hoax* dan kepercayaan masyarakat terhadap berita yang beredar. Rendahnya literasi media membuat masyarakat sulit mengidentifikasi apakah berita ataupun informasi yang diterimanya adalah benar atau salah. Tidak banyak masyarakat yang melakukan pengecekan kembali terhadap informasi yang diterimanya. Bahkan, seringkali masyarakat langsung menyebarkan informasi yang diterimanya sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar dan menyebarkan informasi *hoax* tersebut. Oleh karena itu, cepatnya penyebaran *hoax* di kalangan masyarakat seharusnya diimbangi dengan gencarnya literasi media kepada masyarakat untuk menangkal dampak dari adanya *hoax* tersebut. Literasi media adalah aktivitas yang

menekankan aspek edukasi di kalangan masyarakat agar mereka tahu bagaimana mengakses, memilih program yang bermanfaat dan sesuai kebutuhan yang ada.

Di Indonesia sendiri, penyebaran informasi *hoax* semakin meningkat menjelang pilpres pada tahun 2019. Ditemukan 1.224 kasus *hoax* selama bulan Agustus 2018 – Maret 2019, dengan topik *hoax* paling banyak adalah politik, kesehatan dan pemerintahan. Selama periode Agustus 2018 – Desember 2018, *hoax* yang menggunakan kata kunci Joko Widodo mencapai 73 *hoax*, sedangkan *hoax* dengan kata kunci Prabowo Subianto mencapai 47 *hoax* (<https://tirto.id>, diakses pada 23 Oktober 2020).



Sumber : tirto.id

Selain itu, salah satu *hoax* yang turut menggemparkan masyarakat pada tahun 2018 adalah kasus *hoax* yang menyeret politisi Ratna Sarumpaet. Dalam kasus tersebut, tersebar foto – foto Ratna Sarumpaet dengan wajah lebam dan bengkak yang kemudian diindikasikan sebagai penganiayaan. Kasus ini mendapat banyak perhatian masyarakat dan sejumlah politis. Bahkan beberapa politisi juga ikut memvalidasi peristiwa tersebut, seperti Prabowo Subianto, Amien Rais, Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan masih banyak lagi. Kasus ini terbukti *hoax* setelah Ratna Sarumpaet menggelar konferensi pers dan mengklarifikasi bahwa peristiwa penganiayaan tersebut hanyalah karangan semata (<https://mediaindonesia.com>, diakses pada 23 Oktober 2020). Melalui kasus ini, Ratna Sarumpaet divonis pidana penjara selama 2 tahun (<https://www.liputan6.com>, diakses pada 23 Oktober 2020).

**KASUS HOAX
RATNA SARUMPAET**

2
Oktober
2018

Kasus pertama kali beredar melalui FB.

↓

3
Oktober
2018

1. Prabowo Subianto memberikan pernyataan terkait penganiayaan dan ingin segera bertemu Kapolri.
2. Polisi melakukan penyelidikan dan menyanggah kejadian penganiayaan.
3. Ratna Sarumpaet mengaku berbohong

↓

4
Oktober
2018

Ratna Sarumpaet di ancam hukuman pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta pasal 28 juncto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara.

Sumber: Tim Riset MI/L-1

Foto: MI/BARY FATHAILAH

Sumber : mediaindonesia.com



Sumber : Liputan6.com

Informasi – informasi *hoax* tersebut dipercayai oleh sebagian masyarakat dan menimbulkan konflik karena adanya perbedaan pandangan antar masyarakat. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang saling serang demi membela pilihan politiknya. Hal ini membuktikan bahwa *hoax* memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Dengan konten yang berisi hal negatif yang bermaksud untuk menghasut dan fitnah, *hoax* dapat menysar emosi masyarakat dan menimbulkan perpecahan. *Hoax* juga menyebabkan masyarakat bersikap skeptis yang kemudian akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap media. Semakin banyak *hoax* yang disebarkan oleh media dan kemudian terbukti salah, masyarakat akan sulit mempercayai informasi yang disebarkan oleh media dikemudian hari. Dalam

keberlangsungan suatu negara, *hoax* dapat berpengaruh terhadap perpecahan, instabilitas politik, dan gangguan keamanan yang nantinya berpotensi menghambat pembangunan nasional. Ketika masyarakat mempercayai informasi yang salah, masyarakat akan protes dan berontak terhadap kebijakan – kebijakan pemerintahan. Pemerintah akan kehilangan dukungan dari masyarakat. Minimnya dukungan dari masyarakat akan menghambat kinerja suatu pemerintahan negara demokrasi.

Hoax dapat diatasi dengan mempertimbangkan jurnalis atau media yang menyebarkan informasi tersebut. Di era digital ini, semua orang dapat menjadi jurnalis. Saat kita mengonsumsi sebuah berita atau informasi, kita sebaiknya melihat sumber informasi berita tersebut untuk memungkinkan kebenaran atau keakuratan berita yang diterima. Jika sumber berita yang kita terima tidak kredibel, kemungkinan besar berita tersebut adalah *hoax*. Di Indonesia sendiri, sudah banyak situs untuk melakukan pengecekan apakah informasi yang kita terima adalah *hoax* atau benar, diantaranya adalah turnbackhoax.id, cekfakta.com, stophoax.id. Bahkan Kementerian Komunikasi dan Informasi juga memiliki layanan *chatbot* untuk memverifikasi informasi melalui telegram [@chatbotantihoaks](https://t.me/chatbotantihoaks) (<https://republika.co.id>, diakses pada 17 Oktober 2020). Ada baiknya sebelum kita menyebarkan informasi yang kita dapatkan, kita melakukan pengecekan informasi tersebut terlebih dahulu untuk mencegah semakin banyaknya masyarakat yang percaya terhadap informasi *hoax*.